KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



LKJIP TAHUN 2025

DPMPTSP

KABUPATEN LUWU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Salah satu kebijakan dalam mewujudkan good governance adalah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peqanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mana mewajibkan setiap instansi Pemerintah untuk melaporkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban dimana laporan tersebut dan disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh staf dan berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu **(DPMPTSP)** Tahun 2025 dengan harapan Laporan Kineija ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi pertimbangan dalam menyusun dan pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya, Amin.

Belopa. 02 Februari 2026

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kab. Luwu

Kasnar, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197004052002121007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu merupakan bagian dari suatu tatanan Pemerintahan yang memegang peranan di dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi birokrasi.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka setiap instansi Pemerintah serta unit-unit kerja yang ada untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah selaku pengelolah sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dengan melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan. Menggambarkan Kinerja secara jelas, transparan, sesuai dengan prinsip penyusunan laporan yang relevan, konsisten, tepat, objektif dan wajar.

Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan adanya sistem yang digunakan untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini menjadi sarana instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dengan menggunakan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai komponen yang saling terkait. lmplementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma Instansi Pemerintah, yang semula berorientasi pada uang (Input oriented) menjadi Orientasi pada hasil (Result oriented) serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja diusulkan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dimasa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang objektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan.

1.2 Gambaran Umum

Dalam menunjang dan mendukung terciptanya Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi kepada tujuan yang disepakati, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

Berbagai bukti bahwa perwujudan good govemance pada sebuah organisasi akan menjadikan competitive advantage bagi penyelenggara, dengan kata lain bahwa terselenggaranya hal tersebut merupakan harapan terciptanya clean government dengan terciptanya kepercayaan publik kedalam pertanggungjawaban (accountability) dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Untuk mendukung tata kerja dinas yang mewujudkan terciptanya kepercayaan publik dalam penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP), maka dasar hukum penyusunan LKjlP yang harus dipedomani yaitu :

1. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Instruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang menginstruksikan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubemur, Para Bupatidan Walikota untuk membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan tujuan dan sasaran dinas dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan penerapan dalam organisasi sistem pertanggungjawaban, terfokus pada 2 (dua) implementasi yaitu :

1. Sistem AKIP dan Kinerja, mengharapkan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna dan saling terkait dalam keselarasan yang tegas dengan Perencanaan Stratejik.
2. Renstra, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja mengharapkan adanya sinerjitas yang terbentuk sebagai Stratejik Manajemen Sistem yang meliputi Pemberdayaan Aparatur terhadap tatanan kelembagaan untuk menjadi aparatur handal.

1.2.1 Struktur Organisasi

Sejak diberlakukannya peraturan menteri dalam negeri nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maka diharapkan kepada setiap Pemerintah Daerah dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan filosofi mempercepat, mempermudah dan mempermurah dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan iklim investasi yang sehat di daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya mendukung program tersebut mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata keqa lembaga teknis daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Luwu. Dimana di dalamnya pada pasal 22 mengatur tentang nomenklatur kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penananaman Modal
d. Bidang Promosi Penanaman Modal
e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh satu orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

- Sub Bagian Program;
- Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian:
- Sub Bagian Keuangan

Selain itu Kepala Dinas juga dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Bidang, yakni :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan lklim Penanaman Modal, terdiri atas
   - Sub Koordinator Perencanaan dan Penanaman Modal (Analis Kebijakan Ahli Muda) ;
     a) Analis Perencanaan
     b) Pengelola Permodalan Investasi
   - Sub Koordinator Deregulasi Penanaman Modal (Analis Kebijakan Ahli Muda) ;
     a) Analis Peraturan Iklim Usaha
     b) Pengolah Data Peraturan Investasi
   - Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha (Analis Kebijakan Ahli Muda) ;
     a) Analis Bimbingan Usaha
     b) Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha

2. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri atas
   - Sub Koordinator Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (Analis Kebijakan Ahli Muda) ;
     a) Analis Penanaman Modal
     b) Pranata Promosi
   - Sub Koordinator Pengembangan Promosi Penanaman Modal (Analis

Kebijakan Ahli Muda) ;

a) Penyusun Promosi dan Kerjasama
b) Pengelola Pengembangan Investasi

- Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Penanaman Modal (Analis Kebijakan Ahli Muda) ;

a) Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
b) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana

3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri atas

- Sub Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (Analis Kebijakan Ahli Muda)

a. Pengawas Penanaman Modal
b. Pengelola Pemantauan

- Sub Koordinator Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Analis Kebijakan Ahli Muda) ;

a) Analis Pembinaan Kelembagaan Investasi
b) Pengelola Data

- Sub Koordinator Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal (Pranata Komputer) ;

a) Analis Data dan Informasi
b) Pengelola Data

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas

- Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I (Analis Kebijakan Ahli Muda)

a) Analis Dokumen Perizinan

b) Pengolah Data Pelayanan

- Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan non Perizinan A/II (Analis Kebijakan Ahli Muda) ;

a) Analis Dokumen Perizinan

b) Pengelola Data Pelayanan

- Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III (Analis Kebijakan Ahli Muda) ;

a) Analis Pelayanan

b) Pengolah Data Pelayanan

1.2.2 Kondisi Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Instansi ini merupakan unsur pendukung Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sebagai berikut adalah :

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pelayan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secar terpadu;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan uruan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu:
4. Melaksanakan edministrasi dinas urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu;
5. Melakukan fungsi pengendalian, diantaranya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal dalam wilayah Kab. Luwu;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.4 Keadaan Pegawai

Lingkungan Strategis yang paling berpengaruh pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu adalah Sumber daya manusia Aparatur, namun seiring tuntutan zaman maka dilakukan pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sesuai tupoksi dinas DPMPTSP melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis sehingga menghasilkan sumber daya manusia aparatur yang profesional, berdisplin tinggi dan berskil IT melalui kinerja yang lebih baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu berdomisili di lbukota Kabupaten Luwu yaitu Kecamatan Belopa dengan alamat Jalan Opu Dg Risaju No.1 Belopa

Jumlah Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang tercatat per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 32 (tiga puluh dua) orang berstatus Non Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Kontrak, yang ditempatkan pada 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat dengan komposisi pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4.a : Data Jenis Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025.

No.	Uraian	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	14
3	Golongan ll	
4	Golongan I	
5	Golongan IX	5
6	PPPK Golongan VII	1
7	PPPK Paruh Waktu	20
	Jumlah	**46**

Tabel 1.4.b : Data Jenis Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II.b	1
2	Eselon III.a	1
3	Eselon III.b	4
4	Eselon IV.a	8
5	Staf PNS	6
6	PPPK Full Time	6
7	PPPK Paruh Waktu	20
	Jumlah	**46**

Tabel 1.4.c : Data Jenis Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025

No	Uraian	PNS (Orang)
1	Strata Dua (S2)	5
2	Starata Satu (S1)	30
3	Diploma Tiga (D.III)	3
4	SLTA / Sederajat	5
5	SLTP / Sederajat	
	Jumlah	**46**

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Luwu terletak di Jalan Opu Daeng Risaju No. 1 Kec Belopa (Komplek Lap. Opu Daeng Risaju Belopa). Keadaan Saran a dan Prasarana pada prinsipnya belum memadai karena Kantor yang dimiliki adalah eks Kantor Camat Belopa sehingga luas ruangan belum memadai untuk melakukan aKtivitas Pelayanan secara maksimal. Kemudian prasarana pendukung tertanggal 31 Desember 2025, dengan tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
A	**KENDARAAN OPERASIONAL**	
1	Minibus - Kijang Innova (Roda 4)	1 unit
2	Minibus - Toyota Avanza (Roda 4)	1 unit
3	Motor Trail - Kawasaki KLX (Roda 2)	4 unit
4	Motor Bebek - Honda Blade (Roda 2)	2 unit
5	Motor Metic - Yamaha Mio Soul (Roda 2)	1 unit
B	**PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR**	
1	Global Positioning System (GPS)	1 unit
2	Komputer PC	28 unit
3	Notebook	11 unit
4	Laptop	2 unit
5	Printer	36 unit
6	Lemari besi	12 unit
7	Filling besi	4 unit
8	Brand Kas	1 unit
9	Alat penghancur kertas	1 unit
10	Kursi putar	24 buah
11	Sofa	1 set
12	Air Condition (AC)	17 unit
13	Meja kerja pejabat esolan II	1 buah
14	Meja kerja pejabat esolan Ill	4 buah
15	Kursi kerja pejabat esolan II	1 buah
16	Kursi kerja pejabat esolan III	4 buah
17	Kursi kerja	53 buah
18	Meja rapat	12 buah
19	Meja kerja	38 buah
20	Handycam	1 unit
21	Proyektor + Layar	1 unit

22	Lemari buku untuk pejabat esolan II	2 unit
23	Mesin absensi	2 unit
24	Pemotong kertas	1 unit
25	Mesin laminating	3 unit
26	Gordyn/tirai	1 paket
27	kantor Rak TV	1 unit
28	Televisi	5 unit
29	Personal computer/kiosk IKM (indeks kepuasan masyarakat)	1 unit
30	Server system ITC	1 unit
31	Peralatan jaringan Camera	1 unit
32	Film Telephone	2 unit
33	(PABX) Warless	1 unit
34	UPS	1 unit
35	Rak dudukan	10 unit
36	LCD Rak	1 buah
37	peralatan server	1 buah
38	CCTV	16 unit
39	Instalasi Air Bersih	1 instalasi
40	Papan nama BP3M (LED)	1 unit
41	Logo BP3M	1 unit
42	Lemari Es	1 unit
43	Scanner	1 uni:

Berdasarkan dari kondisi tersebut, maka upaya dalam peningkatan pelayanan secara online belum maksimal.

1.6 Sistematika

Laporan kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 Pencapaian kinerja diukur dengan membandingkan antara indikator kinerja utama dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 - 2029.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas Pengantar lainnya.

Bab. II : Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).

Bab. III : Akuntabilitas kinerja
Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 dengan mengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab. IV : Penutup
Lampiran-lampiran

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu yang awalnya bernama Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu merupakan langkah awal untuk melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu. Perencanaan Strategis dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses sistematis yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurung waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sejumlah langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang termasuk di dalamnya pemberian tanggungjawab haruslah dibangun dalam suatu bingkai komitmen organisasi. Perencanaan strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.1. Visi

Visi merupakan sebuah keinginan yang memandang jauh kedepan (Intutive Judgmen). Untuk memperoleh keadaan masa depan dan akan datang dalam kurun waktu tertentu, dengan sasaran terjadinya perubahan yang nyata. Pembangunan dengan rencana strategis (Renstra) yang terencana akan dapat mengantisipasi tantangan dan perkembangan akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu setiap saat melakukan evaluasi dan kajian terhadap perkembangan diri kearah perubahan dan perbaikan yang mempunyai visi “Prima dalam Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ”

1.2. Misi

Untuk mencapai visinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu telah menetapkan misi-misinya sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mudah, cepat dan transparan;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD terkait, dalam proses pelayanan perizinan,
3. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap proses Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
4. Melaksanakan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparat;
5. Meningkatkan iklim investasi Daerah;
6. Membangun sisitem pelayanan yang berbasis kompotensi dan teknologi;
7. Menyusun data potensi Daerah. melakukan promosi ditingkat regional, Nasional dan Internasional.

1.3 Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian organisasi setidaknya lebih konkrit daripada misi dan mengarah kepada suatu pencapaian hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan adanya pernyataan tujuan maka, akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa yang akan datang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu mempunyai tujuan untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Adapun tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi yang raqmah akan investor

1.4 Sasaran Strategis dan lndikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya AKuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Nilai Realisasi lnvestası.
   Indikator

Kinerja Sasaran yang dicapai oteh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Tahun 2025 yaitu :

a. Nilai Sakip
b. Nilai Survey lndeks Kepuasasn Masyarakat
c. Preseniase Jumlah NIB dan lzin yang diselesaikan sesuai dengan SOP
d. Presentase laporan hasil pemantauan persetujuan dasar dan persyaratan sektor perizinan dan non perizinan
e. Nilai lnvestasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)
f. Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (Perusahaan)

Untuk lebih terperinci dapat diiihat pada table berikut :

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun							Program
					Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4		5	6	7	7	7	7	7	
1.	Meningkatnya Realisasi Infestasi Daerah		Presentase Pertumbuhan Investasi	%	-49.8%	5,7%	5,75%	5,8%	5,85%	6%	6,1%	
		Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp.	1.290 T	2.2T	2.3 T	2.4 T	2.5 T	2.6 T	2.6 T	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Terwujudnya kemudahan Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat	%	88.52%	85.5%	86.5%	86.7%	88.5%	92.5%	92.7%	- Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dan Pengolahan Data.
		Meningkatnya kualitas dukungan unsur penunjang pemerintahan	Muturitas SPIP perangkat Daerah	Nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.1 Penetapan Perjanjian Kerja

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,882,539,185
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,260,431
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,436,329
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,836,329
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,436,329
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,432,360
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,924,478
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3,151,978
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4,042,628
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,866,421,377
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	365 Orang/bulan	2,761,150,926

	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			100,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	90,240,000
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,014,165
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,940,780
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	8,075,506
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12,743,415
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12,743,415
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			285,422,408
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7,682,707
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	33,784,624
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,037,846
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7,334,231
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00

1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8,500,000
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,500,000
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216,583,000
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			340,248,413
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	340,248,413
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Modal			100,00
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			973,774,060
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9,347,189
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	526,426,871
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			100,00
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	438,000,000
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			379,669,081
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	91,098,701
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	288,570,380
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			37,585,115

2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			37,585,115
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	37,585,115
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			100,00
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			44,624,305
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			44,624,305
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	44,624,305
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi			100,00
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			41,627,476
4.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			41,627,476
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	41,627,476
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			100,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			31,962,778
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			31,962,778
5.1.1	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	31,962,778
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			100,00
JUMLAH				**5,038,338,859**

2..2 Penetapan Perjanjian Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu.

Adapun kewenangan yang diamanatkan dari Perda tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pengawasan dan pengencialian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Masyarakat.
- Pemberian Perizinan bidang penanaman modal, perizinan usaha dan non perijinan kepada masyarakat yang membutuhkan Peningkatan kualitas SOM guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Mendorong penyelenggaraan pelayanan prima bagi masyarakat di Kabupaten Luwu.
- Bimbingan teknis pengembangan SDM dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2..3 Penetapan Perjanjian Kerja

Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman fdodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu. Maka Kewenangan yang diberikan adalah mengkoordinasikan dengan instansi teknis itu menyangkut kegiatan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Luwu. Adapun kegiatan itu antara lain ;

- Menghimpun serta mengolah data dengan instansi terkait guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan
- Mewujudkan pelayanan satu pintu di bidang perizinan penanaman modal dan perizinan usaha serta non perizinan demi terciptanya pelayanan prima.
- Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan instansi terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan.
- Meningkatkan jalinan kerja sama pelayanan masyarakat yang pro aktif antara instansi terkait dengan masyarakat.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntanbilitas dengan melakukan kIar:fikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Peng ukuran kinerja dilakukan secara (triwulan) dan tanunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

1.1 Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil Kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntanbilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indiKator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab teqadinya celah Kinerja *Qerformance gap)* maupun terhadap keberhasilan capaian dan beberapa tindakan perbaikan yang diperlukan di masa akan datang, dengan metode ini sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak ekstemal, tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tahapan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran dimulai dari capaian kinerja outcome pada masing-masing kegiatan yang menjadi bahan dalam merumuskan capaian kinerja program, kemudian atas rumusan capaian kinerja program maka dilaKukan analisis keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai dengan indikator yang termuat pada setiap programDalam proses pengukuran capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun 2025, masih juga dijumpai hambatan dalam hal pengumpulan dan identifikasi data kinerja yang ada, sehingga berpengaruh proses pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Beberapa kegiatan mempunyai nilai strategik tinggi yang langsung mempengaruhi pencapaian kinerja dapat teridentifikasi, sedang yang lainnya belum terlihat adanya optimalisasi kegiatan namun kegiatan ini akan tetap mempengaruhi capaian kinerja sasaran organisasi, kemudian dibeberapa sasaran yang telah tercapai masih

terdapat perbedaan kondisi dari indikator kinerja yang digunakan sebagian besar masih pada tingkat output sedang, sementara masih terdapat pula sebagian kecil yang tingkat outcome yang juga rendah sama seperti tingkatan *outcome,* sementara yang diharapkan oleh stakeholder adalah sasaran yang optimal outcome, banyak hal itu yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome atas seluruh kegiatan yang ada dengan penyesuaian kondisi nyata yang diharapkan.
2. Masih diperlukan Sumber Daya Manusia yang professional.
3. Sistem pengumpulan data atas sub sistem dibawahnya.

1.2 Pemberian Bobot

Bobot adalah ukuran satuan prosentase yang mengandung kebenaran/kebaikan terhadap Keyakinan dan periiaku organisasi yang paling disemangati dan digunakan sebagai budaya kerja dalam mengambil keputusan pelaksanaan kegiatan.

Sebagai pengukuran pada *Capaian Indikator Kinerja* (%) = *Realisasi/Rencana x* 100%, namun bila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus *Capaian Indlkator Kinerja* (%) = *Rencana — (Realisasi — Rencana'* x î*00% /Rencana.*

1.3 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran Kinerja diukur dengan membandingkan antara realisasi yang teqadi dari rencana, sebagai satuan dan besaran dari data Daftar kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, untuk memperoleh besaran realisasi yang dapat tercapai terhadap 5 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan dengan masing-masing persentase pencapaian pada table berikut :

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)		SISA ANGGARAN	KET
					(Rp)	(Rp)	KEUANGAN	FISIK		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,882,539,185	4,392,771,023	89,97	91,93		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24,260,431	22,457,602	92,57	97,52		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3,436,329	3,436,329	100,00	98,95	0	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	3,436,329	100,00	98,95		
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,836,329	2,836,329	100,00	100,00	0	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	2,836,329	100,00	100,00		
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,436,329	2,133,500	62,09	95,00	1,302,829	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	2,133,500	62,09	95,00		
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,432,360	3,182,360	92,72	93,00	250,000	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	3,182,360	92,72	93,00		

1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3,924,478	3,674,478	93,63	95,67	250,000	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	3,674,478	93,63	95,67		
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3,151,978	3,151,978	100,00	100,00	0	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	3,151,978	100,00	100,00		
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	4,042,628	4,042,628	100,00	100,00	0	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	4,042,628	100,00	100,00		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,866,421,377	2,621,661,046	91,46	95,46		
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	365 Orang/bulan	365 Orang/bulan	2,761,150,926	2,532,841,947	91,73	94,90	228,308,979	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi				100,00	2,532,841,947	91,73	94,90		
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	90,240,000	74,250,000	82,28	90,05	15,990,000	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	74,250,000	82,28	90,05		

1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4,014,165	4,013,429	99,98	100,00	736	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	4,013,429	99,98	100,00		
1.2.4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,940,780	2,741,230	93,21	94,50	199,550	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	2,741,230	93,21	94,50		
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	8,075,506	7,814,440	96,77	97,85	261,066	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	7,814,440	96,77	97,85		
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				12,743,415	12,242,015	96,07	97,55		
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12,743,415	12,242,015	96,07	97,55	501,400	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	12,242,015	96,07	97,55		
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				285,422,408	281,308,210	98,56	85,02		

1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	7,682,707	7,622,286	99,21	100,00	60,421	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	7,622,286	99,21	100,00		
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	33,784,624	33,387,266	98,82	99,20	397,358	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	33,387,266	98,82	99,20		
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,037,846	9,024,936	99,86	100,00	12,910	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	9,024,936	99,86	100,00		
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7,334,231	6,210,000	84,67	87,95	1,124,231	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	6,210,000	84,67	87,95		
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	8,500,000	8,300,000	97,65	98,00	200,000	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	8,300,000	97,65	98,00		
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	480,000	19,20	10,00	2,020,000	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	480,000	19,20	10,00		

1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	216,583,000	216,283,722	99,86	100,00	299,278	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	216,283,722	99,86	100,00		
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				340,248,413	284,815,210	83,71	84,33		
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	15 Unit	340,248,413	284,815,210	83,71	84,33	55,433,203	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Modal				100,00	284,815,210	83,71	84,33		
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				973,774,060	832,665,033	85,51	91,49		
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	9,347,189	9,275,506	99,23	100,00	71,683	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	9,275,506	99,23	100,00		
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	526,426,871	441,929,527	83,95	86,17	84,497,344	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi				100,00	441,929,527	83,95	86,17		
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	438,000,000	381,460,000	87,09	88,29	56,540,000	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	381,460,000	87,09	88,29		

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				379,669,081	337,621,907	88,93	89,44		
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	6 Unit	91,098,701	73,630,178	80,82	83,53	17,468,523	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	73,630,178	80,82	83,53		
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	288,570,380	263,991,729	91,48	95,35	24,578,651	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	263,991,729	91,48	95,35		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				37,585,115	37,128,400	98,78	98,78		
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				37,585,115	37,128,400	98,78	98,78		
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	2 Dokumen	37,585,115	37,128,400	98,78	98,78	456,715	-
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi				100,00	37,128,400	98,78	98,78		
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				44,624,305	44,489,105	99,70	99,97		
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				44,624,305	44,489,105	99,70	99,97		

3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	44,624,305	44,489,105	99,70	99,97	135,200	
	Pendapatan Bagi Hasil - Belanja Operasi				100,00	44,489,105	99,70	99,97		
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				41,627,476	36,204,521	86,97	98,00		
4.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				41,627,476	36,204,521	86,97	98,00		
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	41,627,476	36,204,521	86,97	98,00	5,422,955	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi				100,00	36,204,521	86,97	98,00		
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				31,962,778	31,852,200	99,65	100,00		
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				31,962,778	31,852,200	99,65	100,00		

5.1.1	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	31,962,778	31,852,200	99,65	100,00	110,578	
	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi				100,00	31,852,200	99,65	100,00		
JUMLAH					**5,038,338,859**	**4,542,445,249**				

Memperhatikan tabel pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan atau tidak. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu untuk tahun anggaran 2025 atas pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatannya mencapai angka 96,94 %.

1.4 Analis Capaian

1.4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan yang dicapai berdasarkan pencapaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2025 diperoleh dengan predikat BERHASIL, dengan dukungan kriteria yang diperoleh berdasarkan sasaran :

1. Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi lzin Mendirikan Bangunan serta lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah.
2. Perwujudan Data dan Dokumen Perencanaan yang sistematis, tepat waktu dan tepat sasaran dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang Profesional, oerdisipiin meiaiui kinerja yang lebih baik.
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah terintegrasi secara eIektronik yang memudahkon bara peIaku usaha dalam pengurusan perizinan usaha dengan cepat dan efesien.

Fase rencana tingkat capaian diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi kinerja dengan masing - masing sasaran dan indikatornya :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

   Terwujudnya rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berupa Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat daerah, Penyeciiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang MiliK Daerah yang Menunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Persentase tingkat capaian rata-rata adalah, sehesar 89,97%

b. Program Promosi Penanaman Modal

   Meningkatnya ReaIisasi lnvestasi dengan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman ModaI Daerah Kabupaten Kota dengan Persentase capaian rata-rata adalah 99,70%.

c. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal

   Meningkatnya realisasi Investasi dengan penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan persentase tingkat capaian rata-rata adalah sebesar 98,78%.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Persentase tingkat capaian rata-rata adalah sebesar 98,00%.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Terwujudnya Kepuasan masyarakat dalam penyelesaian masalah perizinan dan fungsi pemantauan terhadap operasional perusahaan dan meningkatkan ketaatan para investor dalam melaksakan investasi di Kabupaten Luwu dengan indikator sasaran berupa Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal dengan Persentase tingkat capaian, rata-rata adalah sebesar 99,65%.

Maka Pencapaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 berdasarkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 97,76%.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu ini selain merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimakudkan sebagai media Informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman ModaI dan Pelayaran Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sehingga dapat diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja kerja dimasa yang akan datang Guna menciptakan suatu penilaian kinerja yang ideal, maka perlu dijelaskan tentang elemen-elemen rencana strategis yang meliputi tentang Visi Misi, Strategi dan Critical Succes Factor yang akan ditemukan dalam pencapaian Visi Misi tersebut. Perbedaan karakteristik yang natural dan sosial masing-masing instansi menyebabkan perbedaan pola atas critical succes factor yang dimiliki sehingga penetapan strategi dan taktik operesional yang selalu disesuaikan kondisi natural dan sosial daerah tersebut, yang terlihat dari jenis kegiatan yang diprioritaskan.

Ukuran kinerja yang menjadi penyebab nilai bobot belum mencapai target yang diharapkan antara lain karena terdapatnya beberapa program/kegiatan yang belum optimal dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang ditentukan guna menjalankan misi Critical Succes Factor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain :

a. Belum optimalnya pencapaıan kegiatan tugas pokok dan fungsı (Tupoksi) pada Dinas Penanaman Moda! dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
b. Belum terpadunya dinas dan instansi terkait dalam pengembangan penanaman modal.

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan depat diidentifikasikan beberapa masalah yang timbul dan telah di estiminasikan menjadi kendala dalam perencanaan strategis maupun pengukuran kinerja. Berkaitan dengan masalah tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu diupayakan dapat mendukung dalam pemecahan masalah antara hain melalui :

a. Penyiapan SDM untuk berperan sebagai fasalisator pembaharuan manajemen pemeriniah
b. Penyempurnaan rencana strategis.
c. Memperbaıki pengukuran kinerja.
d. Mengkomunikasikan rencana strategi dan pengembangan sistim inforrnasi pengawasan
e. Pemberian saran dan informasi guna menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan Dinas Perıanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dıbandingkan tujuan utamanya namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan Memicu pemahaman lebih dalam tentang rencana strategis Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Memungkinkan pengembangannya dimasa datang dan mendorong tindakan perbaikan terus menerus dalam pencapaian kinerja terutama dalam proses hasil pengawasan yang berkualitas.

Akhirnya selalu terselip harapan semoga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu mampu menetapkan diri sebagai elemen pendukung bagi pencapaian tujuan dan program pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, mudah-mudahan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintan ini memberikan gambaran pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 yang transparan dan sapat dipertanggung jawabkan.

Belopa, 02 Februari 2026

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kab. Luwu

Kasnar, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 197004052002121007